



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : 30 (tiga puluh)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 27 September 2023
Waktu : Pukul 13.50 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Acara : 1. Penjelasan terkait langkah strategis peningkatan pelayanan kesehatan JKN, termasuk:
a. Penguatan program promotif, preventif dalam Program JKN;
b. *Update* revisi Formularium Nasional dan Penilaian Teknologi Kesehatan;
c. Peningkatan kualitas Program Rujuk Balik.
2. Penyampaian hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2022 sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DJSN dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; dan
3. Penjelasan arah kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional.
- Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Hadir : A. - Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI: dr. Maria Endang Sumiwi, MPH;
- Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: Dr. dra. Lucia Rizka Andalusia, M.Pharm, Apt;
- Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI: Syarifah Liza Munira;
- Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN): drg. Agus Suprpto, M.Kes;
- Dewan Pengawas BPJS Kesehatan: Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS;
- Direktur Utama BPJS Kesehatan: Prof. dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK
B. 25 dari jumlah 49 Anggota Komisi IX DPR RI.

I. PENDAHULUAN

Skors Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dicabut pukul 13.50 WIB dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk memastikan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terukur dan berkelanjutan, guna peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan melakukan sinergitas pelaksanaan upaya kesehatan promotif preventif di dalam program JKN, dengan memperhatikan masukan Komisi IX DPR RI, di antaranya:
 - a. Intensifikasi pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) upaya kesehatan promotif preventif ke peserta JKN;
 - b. Berkoordinasi secara aktif dengan kementerian/lembaga terkait validitas dan reliabilitas data penerima program bantuan sosial;
 - c. Peningkatan cakupan skrining 14 penyakit yang didukung dengan kecukupan tenaga kesehatan, sarana prasarana termasuk ketersediaan alat diagnostik yang mudah digunakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - d. Peningkatan kualitas Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan layanan Program Rujuk Balik (PRB), termasuk memastikan ketersediaan obat Prolanis dan PRB di puskesmas.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI meningkatkan akses masyarakat terhadap obat inovatif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui evaluasi Formularium Nasional (Fornas) secara berkala sesuai dengan perkembangan keilmuan terapi medis dan kebutuhan peserta JKN.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Kesehatan memperkuat fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Komisi IX DPR RI setiap 3 (tiga) bulan.

5. Dalam rangka peningkatan kualitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk:
 - a. lebih proaktif dan inovatif dalam meningkatkan kepesertaan dan koletabilitas iuran JKN;
 - b. menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari DJSN dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;
 - c. membuat proyeksi ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan RI dan DJSN, serta melaporkan secara berkala ke Komisi IX DPR RI;
 - d. memaksimalkan pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dalam bentuk investasi sesuai PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk tetap melanjutkan program vaksinasi COVID-19 sampai akhir tahun 2023 dengan terus melakukan upaya peningkatan partisipasi vaksinasi bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.
7. Komisi IX DPR RI akan mendalami permasalahan stunting di dalam Panja Stunting pada masa sidang selanjutnya, dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif.
8. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014, dengan:
 - a. mengambil langkah-langkah strategis menyelesaikan permasalahan validitas data dan tunggakan iuran kepesertaan melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan;
 - b. melaksanakan kewenangan monitoring dan evaluasi serta pengawasan eksternal terhadap BPJS dan melaporkan kinerjanya secara periodik kepada Komisi IX DPR RI.
9. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI untuk disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 2 Oktober 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.45 WIB.

Jakarta, 27 September 2023

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,

FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
MASYARAKAT KEMENTERIAN
KESEHATAN RI,

dr. MARIA ENDANG SUMIWI, MPH

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN
ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
RI,

Dr. dra. LUCIA RIZKA ANDALUSIA, M.Pharm, Apt

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(DJSN)

Drg. AGUS SUPRAPTO, M.Kes

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN (BKPK)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SYARIFAH LIZA MUNIRA

DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN

Prof. dr. ALI GUFRON MUKTI, M.Sc., Ph.D, AAK

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN

Prof. dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS